

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Faktor krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1996-1997 menyebabkan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Azhar, 2008). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur segala urusan dalam daerah tersebut.

Undang-undang Keuangan Negara (17 tahun 2003) dan Undang-undang Pemeriksaan Keuangan dan Akuntabilitas Negara (UU 15 tahun 2005) menjelaskan, laporan keuangan yang akan diserahkan dan dipertanggung jawabkan harus terlebih dahulu melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sehingga menimbulkan kesadaran pentingnya pertanggungjawaban.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 192 tahun 2014 Pasal 2 dan 3 disebutkan BPKP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. Auditor (BPKP) adalah pihak ketiga independen yang diperlukan Pemerintahan untuk mengawasi apakah kinerja laporan keuangan sudah memenuhi kepentingan prinsipal.

Akuntabilitas Pemerintah daerah dapat dinilai salah satunya adalah dengan Opini Audit yang diungkapkan oleh BPK. Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK pada 2010 sampai dengan 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih berjumlah tidak lebih dari 50%. Tabel 1.1 memperlihatkan hasil opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD sejak tahun 2010 hingga 2014 (Semester II). Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan di daerah belum berjalan dengan akuntabel. Semenjak adanya Otonomi Daerah wewenang Pemerintah daerah semakin besar, dana yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah pun harus dapat dipertanggungjawabkan keandalannya melalui LKPD.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD memuat sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Mustikarini (2012) telah melakukan penelitian mengenai hasil audit BPK dengan menggunakan variabel nilai temuan audit. Sementara penelitian Virgasari (2009) menggunakan opini audit dalam menjelaskan hasil audit BPK.

Tabel 1.1
Opini LKPD Tahun 2010-2014 Seluruh Indonesia

Pemerintahan Tahun	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	16	15	0	2	33	105	241	11	41	398	35	55	0	3	93
	48%	45%	0%	6%	100%	26%	61%	3%	10%	100%	38%	59%	0%	3%	100%
2014 (Sem I)	26	7	0	1	34	169	188	4	18	379	56	35	0	0	91
	76%	21%	0%	3%	100%	44%	50%	1%	5%	100%	62%	38%	0%	0%	100%

Sumber: IHPS BKP Tahun 2015 Semester I

BPK menemukan kerancuan dan ketidaksesuaian atas realisasi laporan sehingga terindikasi sebagai sebuah pelanggaran yang kemudian disebut Temuan Audit. Temuan audit dapat mengindikasikan kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau mendapatkan peluang perbaikan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan penyimpangan dengan adanya bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan. Menurut ISO 9000, temuan audit merupakan hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Auditor harus menginvestigasi secara tepat untuk menentukan kriteria audit yang dilanggar dan menentukan rekomendasi tindakan perbaikan (Zulfikar, 2013).

BPKP melakukan perannya sebagai pengawas dengan melaksanakan kegiatan asistensi (pendampingan), sosialisasi dan bimbingan teknis, audit kinerja dan operasional, serta monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah. Peran dari BPKP tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif dengan meningkatkan hasil opini audit dengan semakin banyaknya dilaksanakan peran tersebut maka penilaian terhadap Pemerintah Daerah semakin baik dan

memberikan dampak negatif terhadap nominal temuan audit, dampak negatif ini dimaksudkan semakin banyaknya peran BPKP yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah maka angka serapan anggaran yang diterima oleh Pemerintah Daerah semakin besar dan nominal temuan semakin kecil sehingga Pemerintah Daerah dianggap sudah memanfaatkan dengan baik dana yang diberikan kepadanya.

Penelitian yang dilakukan Wicaksono (2012) menuliskan bahwa salah satu faktor yang mendukung dan mempengaruhi secara signifikan opini audit adalah pendampingan BPKP. Dalam penelitiannya opini dan temuan audit dipengaruhi oleh faktor peran BPKP yaitu pendampingan (asistensi), namun peran BPKP disini hanyalah peran konsultasi. Penelitian ini menguji peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah secara kuantitatif apakah memiliki pengaruh terhadap opini dan temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ren Adam Abdillah Siregar dan Dyah Setyaningrum (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa peran BPKP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nominal temuan audit.

Pada penelitian ini menggunakan variabel hasil audit BPK yang diprosikan dengan temuan dan opini audit BPK. Atas dasar beberapa kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan replikasi atas penelitian milik Ren Adam Abdillah Siregar dan Dyah Setyaningrum (2015) mengenai pengaruh peran Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah terhadap opini dan temuan audit. Beda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah sampel yang digunakan berupa data hasil audit atas LKPD tahun 2015 dan

difokuskan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/ Kota. Peneliti memilih memusatkan penelitian hanya pada Provinsi Jawa Tengah karena belum ada penelitian yang dilakukan khusus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan agar lebih terfokus serta tidak terlalu banyak data yang kurang valid.

1.2. Rumusan Masalah

Otonomi daerah memberikan kebebasan untuk tiap daerah dalam mengurus serta mengatur hak dan kewajiban wilayahnya sendiri, namun pengawasan dari pemerintah pusat tidaklah terlepas begitu saja karena bagaimanapun kondisi suatu daerah dapat mencerminkan kepribadian suatu negara. Rumusan masalah yang diambil sesuai uraian dari latar belakang di atas adalah:

1. Apakah asistensi (pendampingan) memiliki pengaruh terhadap tingkat opini dan nominal temuan audit?
2. Apakah penugasan audit kinerja dan operasional BPKP tahun yang lalu memiliki pengaruh terhadap tingkat opini dan nominal temuan audit tahun ini?
3. Apakah monitoring dan evaluasi tahun yang lalu memiliki pengaruh terhadap tingkat opini dan nominal temuan audit tahun ini?
4. Apakah sosialisasi dan bimbingan teknis memiliki pengaruh terhadap tingkat opini dan nominal temuan audit?
5. Apakah peran BPKP dalam perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut temuan audit di tahun yang lalu membantu pemerintah

daerah mendapatkan tingkat opini audit yang lebih baik dan membantu pemerintah daerah mendapatkan nominal temuan audit yang lebih kecil di tahun ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bahwa:

1. Asistensi (pendampingan) memiliki pengaruh terhadap tingkat opini audit dan nominal temuan audit.
2. Penugasan audit kinerja dan operasional BPKP tahun yang lalu memiliki pengaruh terhadap tingkat opini audit dan nominal temuan audit tahun ini.
3. Monitoring dan evaluasi tahun yang lalu memiliki pengaruh terhadap tingkat opini audit dan nominal temuan audit tahun ini.
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis memiliki pengaruh terhadap tingkat opini audit dan nominal temuan audit.
5. Peran BPKP dalam perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut temuan audit di tahun yang lalu membantu pemerintah daerah mendapatkan tingkat opini audit yang lebih baik dan membantu pemerintah daerah mendapatkan nominal temuan audit yang lebih kecil di tahun ini.

1.4. Kontribusi dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi akademisi maupun praktisi.

- a. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta pengetahuan yang berkaitan dengan BPKP dan audit pemerintahan. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini dan temuan audit oleh BPKP.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya BPKP mampu menjadi pemimpin, pemantau, serta pendamping dalam pengawasan keuangan dan pembangunan yang terselenggara dalam instansi pemerintahan.